

Penanganan Korupsi BP Salatiga

SEBAGIAN warga Kota Salatiga hingga sekarang terus memantau kinerja aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus korupsi buku wajib terbitan PT Balai Pustaka (BP) senilai Rp 17,6 miliar. Sesuai dengan audit BPK, nilai kerugian proyek tahun anggaran 2003-2004 itu sekitar Rp 5,3 miliar.

Oleh **Sri Mulyono**



Penyelesaian kasus tersebut bisa dikatakan berseri. Pada seri pertama ada empat tersangka ditahan dan diwajibkan mengganti kerugian negara. Mereka yakni mantan Ketua DPRD Sri Utami Djatmiko Wardojo, dan Ahmadi, mantan anggota DPRD, kemudian mantan

Kepala Kantor Pendidikan Nasional Drs Bakrie MEEd, dan stafnya Drs Kadarisman.

Dalam penyelesaian seri kedua, penyidik dari Polres Salatiga sebenarnya sudah lama menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan pejabat dan pejabat yang masih aktif. Beberapa hari lalu, penyidik sudah menyerahkan BAP mereka ke Kejari dan kini tinggal menunggu apakah berkas tersebut dinyatakan P21 (lengkap) atau masih perlu dikembalikan lagi.

Ada beberapa pertanyaan yang patut diajukan

kepada penyidik dan penuntut umum (Kejari Salatiga) terhadap penyelesaian seri kedua kasus tersebut. Pertama, mengapa keempat tersangka tidak ditahan?

Coba bandingkan dengan kasus "kecil" yang dilakukan Yudi Bayuga (48), warga Perum Yudistira Blok A/4 Salatiga, yang dituduh mencuri helm milik Apri Susanto (23), karyawan Grand Wahid Hotel (GWH) Salatiga, langsung ditahan begitu korban lapor ke Polsek Sidorejo? Bukankah di mata hukum, semua orang diperlakukan sama (*equality before the law*)?

Mengapa keempat tersangka korupsi buku wajib PT Balai Pustaka seri kedua itu masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari? Memang dua dari empat tersangka sudah pensiun, namun dua orang lainnya masih beraktivitas sebagai PNS.

Pertanyaan kedua, mengapa pula penuntut umum sering kali mengembalikan BAP keempatnya yang telah diajukan sejak tahun 2009? Mengapa sepertinya tak ada "kesepakatan" antara kepala Polres dan kepala Kejaksaan Negeri Salatiga untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut.

Antarinstansi penegak hukum memang tak boleh saling mengintervensi tugas dan wewenangnya. Namun, dalam kasus ini, ada baiknya

www.kompas.com

penuntut umum "menuntun" penyidik secara langsung mengenai kekurangan berkas keempat tersangka. Selama ini, penuntut umum hanya memberikan catatan terhadap kekurangan BAP.

Sesuai Aturan

Bila antarpenghak hukum mau bersinergi menegakkan hukum di Salatiga, seri kedua kasus ini pasti bisa segera diselesaikan. Salah satu caranya, ada "kerja sama" antara penuntut umum dan penyidik. Sudah pasti kerja sama tersebut harus tetap sesuai dengan koridor hukum.

Kalau tak cepat diselesaikan, bagaimana mungkin janji penyidik yang akan menyikat habis semua orang yang terlibat kasus tersebut akan disidangkan? Padahal, kasus tersebut menyeret wakil rakyat yang tak hanya Sri Utami dan Ahmadi SH saja. Bagaimana pula keterlibatan pejabat lain di lingkungan Pemkot Salatiga? Termasuk otak dari kasus korupsi tersebut yakni Murod Irawan, broker



PT Balai Pustaka untuk wilayah Jawa Tengah?

Dari penyelesaian kasus tersebut, masyarakat akan dapat mengetahui seberapa serius aparat penegak hukum benar-benar menuntaskan kasus korupsi yang terjadi di Salatiga. Korupsi di Salatiga yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah, tak hanya pengadaan buku wajib saja tetapi juga dugaan korupsi pembangunan salah satu gedung di SMAN 1 Salatiga. Masih di institusi sama, ada dugaan pemungutan uang atas nama rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)?

Termasuk dugaan korupsi pengadaan alat multimedia di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Ada pula dugaan penyelewengan pembangunan jalan lingkaran selatan (JLS). Belum kasus terbaru dibongkar Kejari Salatiga yang kini perkaranya ditarik Kejati Jateng, yakni pembangunan Masjid Darul Aamal di kompleks STAIN Salatiga

www.kompas.com

senilai Rp 10,788 miliar.

Kalau kasus BP saja tak kunjung selesai hingga saat ini, pertanyaan yang muncul di benak warga Salatiga ini, kapan kasus korupsi lainnya diselesaikan? Semua kasus korupsi yang masih diselidiki dan disidik tersebut, merugikan keuangan negara sampai miliaran rupiah. Termasuk merugikan kepentingan masyarakat gara-gara tertundanya pemanfaatan proyek yang dikorupsi tersebut.

Buat aparat di kepolisian dan Kejaksaan Negeri Salatiga, masyarakat Salatiga siap mengacungkan kedua jempolnya bila semua kasus korupsi dapat diungkap tuntas dan secara transparan. (10)

— **Drs Sri Mulyono, Ketua Masyarakat Madani Salatiga**

Alamat Baru

Kirimkan artikel wacana lokal (hal 7) ke: wacana_lokal@suaramerdeka.info. Panjang tulisan maksimal 5.000 karakter with space. Sertakan foto close up, pose santai. (Red)